

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemutakhiran data pemilih pada tahun 2013 berbeda dengan pemutakhiran pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018. Pemutakhiran data pemilih tahun 2013 masih menggunakan data DP4 yang berasal dari pemerintah daerah dan data tersebut belum disinkronisasi oleh KPU. Selain data DP4 yang belum di sinkronisasi oleh KPU bersama Pemerintah Daerah dan data tersebut masih diolah secara manual oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP. Sementara pemutakhiran data pemilih tahun 2018 sudah menggunakan data pemilih yang bersumber dari DP4 dan telah disinkronisasi oleh KPU bersama Kemendagri dengan cara menyandingkan data DP4 atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu dengan data pemilih pada pemilihan atau pemilu terakhir. Selain itu juga pemutakhiran data pemilih telah dilakukan berdasarkan IT namun belum terhubung secara sistematis antara KPU, Disdukcapil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
2. Model pemutakhiran data pemilih yang direkomendasikan pada pemilu serentak nasional pada tahun tahun 2024 adalah selain pemutakhiran data yang berkelanjutan dan juga *upgrade* data pemilih yang berbasis SIDALIH yang

terhubung dengan KPU Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan serta Kelurahan

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas maka dapat disarankan kepada pihak-pihak yang berkementingan yaitu sebagai berikut :

1. Pemutakhiran data pemilih sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan atau di *upgrade* secara terus menerus yang didasarkan pada data dari Disdukcapil yang pemutakhirannya menggunakan IT yang dikolaborasi dengan SIDALIH dan SIAK agar perubahan data disetiap kelurahan langsung terhubung dan diketahui oleh KPU Kab/Kota, Disdukcapil, pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. Aplikasi ini hanya ada di Disdukcapil Pemerintah kecamatan dan kelurahan dan KPU hanya diberikan data pemilih disetiap kelurahan
2. Pemutakhiran data pemilih perlu dukungan dari pemerintah daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana berupa aplikasi dan perangkat komputer serta tenaga operator yang memiliki keahlian dibidang komputer dan berintegritas baik yang ditempatkan di KPU, Disdukcapil, di Kecamatan maupun di Kelurahan.

## REFERENSI

### **Buku:**

Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Cetakan pertama.

Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Albani Nasution, M Syukri, 2017 *Hukum Dalam Pendekatan filsafat*, Cetakan

Kedua. Kencana Jakarta

Aswanto (2012) *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*

Yogyakarta Rangkang Education

Huda, Ni'matul . 2018. *Ilmu Negara* PT Rajagrafindo Persada

Hyronimus Rhiti. 2015 *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik ke*

Postmodernisme. Cetakan Kelima. Universitas Atma Jaya Ygyakarta.

Jasin, Johan. 2016. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. CV Budi Utama

Yogyakarta

\_\_\_\_\_2019 *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi*

daerah. CV Budi Utama. Yogyakarta

Kumolo, Tjahjo, 2015. *Politik hukum Pikada serentak*. Cetakan Pertama

PT Mizan Publika Jakarta Selatan.

M. Agus, Santoso 2014. *Hukum Moral dan Keadilan, Sebuah Kajian*

Filsafat Hukum. Cetakan Kedua Kencana Jakarta.

Marzuki. Peter Mahmud .2016. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.

Jakarta

- Mukti Fajar ND.2017. *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Handoko, Priyo, 2020. DPT di Balik Layar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Pasca Sarjana UNG 2016. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*
- Raharjo, satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Buku Kerja PPDP 2018 KPU mencoklit Cocokan Data dan Teliti Bekerja Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Salim. 2017. Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Disertasi dan Tesis. PT afindo Persada Depok
- Soerjono Soekanto. 2015. Penelitian Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, hal.33. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Suha, Arif.M, 2014. *Reformasi Birokrasi Pelayanan Prima pemilu*. PT Jaya Fifa Nusantara, Jakarta
- Thaib, Dahlan dkk, 2017. *Teori dan Hukum Konstitusi*. PT Rajagrafindo Persada
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pustaka Sandrojaya Jakarta
- Undang-Undang Otonomi Daerah. 2011. Fokusmedia. Bandung.

Yulhasni, dkk. 2020. DPT Di Balik Layar, Cetakan Pertama. Komisi  
Pemilihan Umum Republik Indonesia

**Jurnal Nasional/ Internasional**

Lijhart, Arent *Democracy Patterns of Majoritarian and Concecus Government in  
Twenty One Countries Yale University PresssNew Have and  
London 1984*

Asy'ari, Hasyim ; Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia Belajar dari  
Pengalaman Menuju Perbaikan; Jurnal pemilu dan Demokrasi 2  
Feburuari 2012 Memeperkuat Sistim Pemutakhiran Data Pemilih dalam  
*ACE Electoral knowledge network “ Voluntary versus mandatory  
Registration and self initiated versus state initiated registration*

Yunus, Nur Rahim Aktualisasi demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa  
dan Bernegara. Jurnal Sosio Didaktika. *Social Science Education  
Juournal Vol.2 No, 2 hlm 162November 2015*

Mohamad Faisal Ridho ; Kedaulatan Rakyat sebagai Perwujudan  
Demokrasi Indonesia Volume. 1 Nomor 8e 2017

Jurnal Antropologi online <http://Jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/janto>

. Isu-Isu Sosial Budaya Budaya Kerja Petugas pemutakhiran Data  
pemilih dalam Pemilu di Kota Padang Panjang oleh Weriza Volume  
20 December 2018.

Jurnal Mahkamah Konstitusi Hak Pilih sebagai hak Konstitusional, Hak  
Konstitusional Turunan, ataukah Hak Tersirat? Oleh Bisariyadi di akses  
tanggal 2 Juli 2020

Ricardo Gosalbo-Bono, "The Significance of the Rule of Law and Its  
Implications for the European Union and The United States," *University  
of Pittsburgh Law Review* Vol 72, no. 2 (2010).

Pietro Costa, Danilo Zolo, and Emilio Santoro, *The Rule of Law, History, Theory  
and Criticism* (Dordrecht: Springer, 2007). Hlm. 75. 4 Åke Frändberg,  
*From Rechtsstaat to Universal Law-State. An Essay in  
Philosophical Jurisprudence* (Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht,  
and London: Springer, 2014).

Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat* Zulkarnain Ridlwan  
Dosen Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Lampung Fiat Justitia  
Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei

Ramlan Surbakti, Pelanggaran dan Kekerasan Pemilu dan Penyalahgunaan Uang  
Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu, Makalah Jakarta. Kemitraan,  
2014

Nugroho Setyo Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan Jurnal Cita Hukum Volume.1 Nomor 2

Dieter Nohlen 1995 'Voting Right' dalam *Seiomour Martin Lipset (ed) 1995 the Encyclopedia of democracy Volume IV wahingnton D.C Congressional Quartely inc.*

### **Peraturan Perundang-Undangan;**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pilkada.hlm 23

Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2017 perubahan dari PP nomor 6 tahun 2005 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2011.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang  
Penyusunan Daftar pemilih di Dalam Negeri Dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2019 Tentang  
Pentakhiran Data Pemilih pemilihan Anggota DPR,DPD, dan  
DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Junto Peraturan Komis  
Pemilihan Umum Nomor 38 tahun 2018.

**Internet:**

*<http://Ejournalrademintan.ac.id/index.php/TAPIS/artcle/view/1589> diakses  
tanggal 12 Juni 2020.*